

**IMPLEMENTASI PROGRAM KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS
DI DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN
KELUARGA BERENCANA KOTA BALIKPAPAN**

Muhammad Riyadh Apriyanto
NPP. 30.0989

*Asal Pendaftaran Kota Balikpapan, Kalimantan Timur
Program Studi Studi Kependudukan dan Pencatatan Sipil*

Email : mriyadh211@gmail.com

Pembimbing Skripsi : Joko Moersito, S.H., MH

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): The problem of population growth rate must receive good attention because national development in the education, economy, security sectors is influenced by optimal family planning programs. To achieve the success of the family planning program, it must pay attention to Couples of Childbearing Age (PUS). Due to couples of childbearing ages who are factors of population development in Balikpapan City. **Purpose:** This study aims to find out how the implementation of the quality family village program in the Balikpapan City Office of Women's Empowerment, Child Protection and Family Planning (DP3AKB), what can hinder and support the implementation of the quality family village program in Balikpapan City. **Method:** In this quality family village program research, the author collected data with observation techniques, documentation, and interviews with informants. Data analysis that researchers do by reducing data, presenting data and drawing conclusions. This research uses qualitative methods with descriptive methods as well as with an inductive approach and analyzes implementation with theories from George Edward III. **Result:** The results of the study show that the implementation of quality family village programs in the Balikpapan City Office of Women's Empowerment, Child Protection and Family Planning has gone quite well, but there are still some problems in its implementation, namely the lack of funds available for quality village programs, so that in some activities PKBs rely on CSR and self-help from the community, In addition, there are still people who do not realize the importance of quality family village programs because there are still those who think that many children have a lot of fortune. If this is not addressed, it will be an inhibiting factor in the success of the quality family village program in Balikpapan City. **Conclusion:** The implementation of the Quality Family Village Program in Balikpapan City has so far gone well even though it was hampered due to the Covid-19 pandemic. The government coordinates OPD and cross-sector to strengthen Quality Family Village activities in Balikpapan City.

Keywords: Implementation, quality family village program at the department of women's empowerment, child protection, and family planning of Balikpapan city

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Permasalahan angka laju pertumbuhan penduduk harus mendapat perhatian yang baik dikarenakan pembangunan nasional disektor Pendidikan, ekonomi, keamanan dipengaruhi oleh Program KB yang optimal. Untuk mencapai keberhasilan program KB maka harus memperhatikan Pasangan Usia Subur (PUS). Dikarenakan pasangan usia subur yang menjadi faktor dari perkembangan penduduk pada Kota Balikpapan. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan guna mengetahui bagaimana implementasi dari program kampung keluarga berkualitas di dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Balikpapan (DP3AKB), apa saja yang dapat menghambat dan penunjang jalannya Program kampung keluarga berkualitas di Kota Balikpapan. Serta upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah. **Metode:** Pada penelitian program kampung keluarga berkualitas ini penulis mengumpulkan data dengan Teknik observasi, dokumentasi serta wawancara dengan informan. Analisis data yang peneliti lakukan dengan Reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan metode deskriptif serta dengan pendekatan induktif dan menganalisis implementasi dengan teori dari George Edward III.. **Hasil/Temuan:** Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa implementasi program kampung keluarga berkualitas di dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Balikpapan sudah berjalan cukup baik, akan tetapi masih terdapat beberapa masalah dalam pelaksanaannya yaitu kurangnya dana yang tersedia untuk program kampung berkualitas, sehingga dalam beberapa kegiatan para PKB mengandalkan CSR serta swadaya dari masyarakat, selain itu masih ada masyarakat yang belum menyadari tentang pentingnya program kampung keluarga berkualitas karena masih ada yang beranggapan bahwa banyak anak banyak rejeki. Hal tersebut bila tidak dibenahi akan menjadi faktor penghambat dari keberhasilan program kampung keluarga berkualitas di Kota Balikpapan. **Kesimpulan:** Implementasi Program Kampung Keluarga Berkualitas di Kota Balikpapan sejauh ini berjalan dengan baik meski sempat terhambat karena adanya pandemi covid 19. Pemerintah melakukan koordinasi terhadap opd lain maupun lintas sektor guna menguatkan kegiatan Kampung Keluarga Berkualitas di Kota Balikpapan.

Kata kunci : Implementasi, Kampung Keluarga Berkualitas, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Balikpapan

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia adalah salah satu negara terbesar di asia tenggara dan termasuk 4 besar negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia setelah China, India, Amerika. Berdasarkan dari website dukcapil.kemendagri.go.id. Jumlah penduduk Indonesia pada semester 1 tahun 2022, yaitu 275.361.267 jiwa yang terbagi dari 138.999.996 penduduk laki laki dan 136.361.271 penduduk perempuan. Tingginya jumlah penduduk yang tinggi adalah masalah yang sering ditemui di negara-negara dengan status berkembang. Jika pertumbuhan terus mengalami peningkatan hingga tak terkendali maka bisa menyebabkan terganggunya kualitas

penduduk di negara tersebut. Adanya peningkatan jumlah Pengangguran, angka kemiskinan dan menurunnya angka harapan hidup. Hal tersebut merupakan dampak dari meningkatnya jumlah penduduk yang tak terkendali.

Masalah tingginya angka pertumbuhan penduduk menyebabkan permasalahan baru seperti kemiskinan, kriminalitas serta meningkatnya angka pengangguran. Hal tersebut menjadi faktor dari negara-negara dunia membuat sebuah program-program dan kebijakan dalam mengendalikan masalah tingginya pertumbuhan penduduk seperti di China dengan one child policy, stop at two di Singapura dan di Indonesia dengan program Keluarga Berencana (KB). KB atau Keluarga Berencana adalah salah satu upaya pemerintah Indonesia untuk bisa menekan dan mengendalikan angka fertilitas di Indonesia dengan cara melakukan sosialisasi tentang alat kontrasepsi untuk mengatur jarak kehamilan.

Penduduk Indonesia secara jumlah mengalami perkembangan yang jika tidak diatasi dengan baik maka akan menimbulkan masalah sosial yang baru. Dengan adanya program KB diharapkan dapat bermanfaat pada perkembangan dan pembangunan masyarakat. Upaya agar tetap melaksanakan program keluarga berencana dengan optimal tentunya adalah suatu keharusan bagi pemerintah. Dengan program KB pada dasarnya memiliki tujuan untuk menekan dan mengendalikan laju pertumbuhan penduduk yang akan berdampak kepada tingkat kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Berbagai upaya dilakukan agar program KB dapat berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan dan agar mendapat dukungan dan partisipasi masyarakat. Oleh sebab itu pemerintah membentuk lembaga khusus guna menangani tentang keluarga berencana yaitu BKKBN Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. BKKBN adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah guna menjadi pelaksana teknis resmi yang terstruktur mulai dari tingkat pusat sampai kelurahan/desa.

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DK3AKB) sebagai yang diberi wewenang dalam pelaksanaan program KB dan sebagai penyedia fasilitas serta penggerak program KB harus bisa berupaya dengan optimal dalam mewujudkan program-program yang dibuat guna menekan serta mengendalikan angka pertumbuhan penduduk. Dukungan serta partisipasi dari masyarakat sangat diperlukan agar program yang telah dibuat bisa berjalan lancar sesuai tujuannya. Permasalahan angka laju pertumbuhan penduduk harus mendapat perhatian yang baik dikarenakan pembangunan nasional disektor Pendidikan, ekonomi, keamanan dipengaruhi oleh Program KB yang optimal. Untuk mencapai keberhasilan program KB maka harus memperhatikan Pasangan Usia Subur (PUS). Dikarenakan pasangan usia subur yang menjadi faktor dari perkembangan penduduk.

Program Kampung Keluarga Berkualitas yang dahulu bernama kampung keluarga berencana, akan tetapi dalam Surat Edaran Kemendagri No. 843.4/2879/SJ Tahun 2020 merubah nomenklatur kampung keluarga berencana menjadi kampung keluarga berkualitas. Kampung Keluarga Berkualitas dibentuk guna meningkatkan kualitas masyarakat di Tingkat kampung guna menciptakan keluarga kecil yang berkualitas. dan program KB diharapkan bisa membantu masyarakat guna membangun kesadaran tentang pembangunan penduduk, Oleh karena itu pada tanggal 02 desember 2017 pemerintah Balikpapan mencanangkan

Kampung Keluarga Berkualitas di Balikpapan dengan nama Kampung Keluarga Berkualitas Seraya Adhika.

Berdasarkan fenomena di atas penulis ingin melakukan penelitian tentang program KB dengan mengambil judul **“IMPLEMENTASI PROGRAM KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS DI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BALIKPAPAN”**

1.2 Kesenjangan Masalah

Permasalahan laju pertumbuhan penduduk dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti program KB yang diterangkan di atas. Masih ada permasalahan yang harus dihadapi oleh pemerintah kota Balikpapan. Terdapat beberapa kendala terkait pelaksanaan program Kampung Keluarga Berkualitas di kota Balikpapan yang pertama yaitu masih banyaknya Kampung Keluarga Berkualitas yang tidak aktif berkegiatan dan yang kedua anggaran yang ada di Kampung Keluarga Berkualitas terbatas karena bersumber dari dana alokasi khusus non fisik dan APBD yang jumlahnya tidak banyak.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks penanggulangan bencana sebagai berikut. Pertama, penelitian Eksistensi Program Kampung Keluarga Berencana Terhadap Masyarakat di Dusun Borong Ampirie Kecamatan Limpo Kecamatan Sinjai (Muzdalifah,2020) dengan menggunakan Metode penelitian Kualitatif deskriptif. Kedua, penelitian Pengembangan Masyarakat Melalui Program Kampung Keluarga Berencana di Padukuhan Malangrejo Kecamatan Ngemplak Kabupaten Sleman (Zada Ghani Fuada,2020) dengan menggunakan metode penelitian Deskriptif. Ketiga, Penelitian Implementasi Program Kampung KB Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kelurahan Gunung Pangilun Kecamatan Padang Utara Kota Padang (Rahman HM, Junaidi Indrawadi, 2019) dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, lokus penelitian yang digunakan oleh peneliti bertempat pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DK3AKB) Kota Balikpapan. Waktu penelitian ini di laksanakan tahun 2023.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan guna mengetahui bagaimana implementasi dari program kampung keluarga berkualitas di dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Balikpapan (DP3AKB), apa saja yang dapat menghambat dan penunjang jalannya Program kampung keluarga berkualitas di Kota Balikpapan serta upaya serta solusi dari pemerintah untuk mengatasi masalah.

II. METODE

Pada penelitian program kampung keluarga berkualitas ini penulis mengumpulkan data dengan Teknik observasi, dokumentasi serta wawancara dengan informan. Analisis data yang peneliti lakukan dengan Reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan metode deskriptif serta dengan pendekatan induktif dan menganalisis implementasi dengan teori dari George Edward III dalam Rusli (2013:100-104) mempertegas bahwa Implementasi merupakan kegiatan yang begitu kompleks dan memiliki banyak faktor untuk mempengaruhi keberhasilan implementasi yang terdiri dari 4 faktor yaitu Komunikasi, sumber daya, disposisi serta struktur birokrasi.

Informan pada penelitian ini terdapat 10 informan yang terdiri dari Pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan anak dan Keluarga Berencana Kota Balikpapan dan masyarakat. Pengambilan informan yaitu dengan menggunakan metode sampling yaitu *sampling purposive* dan *Snowball sampling* yang dijelaskan dalam sugiyono (2021:95-96).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Implementasi Program Kampung Keluarga Berkualitas di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Balikpapan.

Implementasi Program Kampung Keluarga Berkualitas di DP3AKB Kota Balikpapan penulis menerapkan indikator yang dikemukakan oleh Edward III. Implementasi adalah sebuah proses yang dimana sebuah keputusan atau kebijakan harus dilakukan guna mencapai tujuan. Dalam penerapan kebijakan memiliki empat faktor antara lain:

a. Komunikasi

Proses Komunikasi dalam implementasi kebijakan program Kampung Keluarga Berkualitas yaitu berupa penyampaian sebuah informasi dari DP3AKB Balikpapan yang merupakan pelaksana dari kebijakan kepada masyarakat. komunikasi yang baik memiliki tiga faktor penting guna menjadikan komunikasi itu optimal yaitu Transmisi, Kejelasan, Konsistensi.

1. Transmisi

Dalam penyampaian transmisi Implementasi program Kampung Keluarga Berkualitas di Kota Balikpapan, DP3AKB sebagai pelaksana teknis melakukan kerja sama dengan pihak lainnya serta melakukan sosialisasi di lapangan serta penyuluhan secara langsung oleh PKB serta melakukan promosi melalui media masa dalam hal ini sosial media dalam program Kampung Keluarga Berkualitas ini bisa dipahami dan dimengerti oleh masyarakat Kota Balikpapan.

2. Kejelasan

Dalam penerapan sebuah kebijakan jika ingin sesuai dengan apa yang diinginkan maka tata cara serta petunjuknya harus dikomunikasikan dengan jelas. Untuk kejelasan dari informasi program Kampung Keluarga

Berkualitas yang diberikan oleh DP3AKB kota Balikpapan sudah cukup baik dan jelas. Walaupun masih ada masyarakat yang kurang memahaminya.

3. Konsistensi

Konsistensi dapat mempengaruhi keberhasilan kebijakan atau keputusan yang dimana dalam menjalankan program atau kebijakan perlu adanya konsistensi oleh tim pelaksana dalam hal ini Pokja atau kelompok kerja Kampung Keluarga Berkualitas. Karena jika kebijakan yang disampaikan jelas namun pelaksanaannya kurang bahkan tidak konsisten dapat berakibatkan proses implementasi tidak bisa berjalan sesuai dengan rencana serta tujuan.

b. Sumber Daya

Untuk mengetahui sumber daya dalam implementasi maka sumber daya dibagi menjadi 2 yaitu Sumber daya manusia dan finansial.

1. Sumber Daya Manusia

Dalam implementasi Kampung Keluarga Berkualitas di Kota Balikpapan Sumber daya manusia pegawai sudah melakukan upaya – upaya untuk mengimplementasikan Program Kampung Keluarga Berkualitas. Masyarakat juga memiliki Peran dalam Sumber Daya Manusia dikarenakan Jika masyarakat tidak memahami sebuah kebijakan maka kebijakan sulit untuk berjalan dengan rencana yang telah dibuat. Dalam Implementasi program KB di Kota Balikpapan.

2. Sumber Daya Finansial

Sumber daya finansial ialah sumber daya yang membahas soal dana yang sudah dirancang sebelumnya dengan jangka waktu yang telah ditentukan yang nantinya akan dialokasikan untuk sebuah program atau kegiatan. Dalam penelitian ini mendapati bahwa dana untuk program Kampung Keluarga Berkualitas masih kurang. Dalam pelaksanaannya Sumber daya finansial hanya berdasarkan dari dana alokasi khusus non fisik dan apbd yang jumlahnya tidak banyak.

c. Disposisi/ Sikap Pelaksana

Disposisi/sikap pelaksana juga dapat mempengaruhi terhadap keberhasilan dari sebuah implementasi program maupun kebijakan. Dikarenakan jika para implementor sudah menjalankan tugas secara baik, maka kebijakan yang diinginkan oleh para pembuat kebijakan akan terlaksana dengan baik. Dalam disposisi ada hal penting yang harus diperhatikan yaitu pengangkatan birokrat dan insentif.

1. Pengangkatan Birokrat

Pengangkatan birokrat yang baik mengharuskan memilih orang-orang yang mempunyai skill, kompetensi serta kemampuan dan pemahaman terhadap sebuah kebijakan yang ingin dijalankan. Suatu kebijakan bisa terimplementasi dengan baik jika mendapat dukungan oleh birokrat yang

mempunyai nilai kompetensi, kemampuan serta loyalitas. Sikap para birokrat bisa menentukan arah dari sebuah kebijakan atau program itu dilaksanakan serta dijalankan. Dari penelitian menunjukkan sikap yang diberikan para kader sebagai implementor dari program Kampung Keluarga Berkualitas di Kota Balikpapan. DP3AKB menempatkan PKB pada seluruh kelurahan yang ada di Balikpapan guna melakukan pendekatan serta sosialisasi kepada masyarakat.

2. Insentif

Diperlukan insentif agar orang bisa bertindak sesuai dengan apa yang pembuat kebijakan harapkan, dengan cara menambah biaya tertentu sehingga membuat para penyelenggara termotivasi dan melaksanakan tugas dengan baik.

d. Birokrasi/ SOP

Struktur birokrasi dapat berpengaruh dalam keberhasilan implementasi sebuah program atau kebijakan. Kebijakan mengharuskan terciptanya Kerjasama dari berbagai pihak, Ketika struktur tidak konsisten maka hal tersebut bisa menghambat sebuah kebijakan untuk bisa dijalankan dengan sesuai apa yang telah direncanakan sebelumnya. Diperlukan struktur birokrasi yang baik agar dapat mendukung kebijakan untuk bisa mencapai tujuan utama dari penerapan Program Kampung Keluarga Berkualitas di Kota Balikpapan. Aspek dasar dari suatu organisasi ialah adanya prosedur kerja atau SOP yang merupakan prosedur yang berasal dari organisasi itu sendiri dan berisi tentang standar yang baku dalam melaksanakan atau menjalankan pekerjaan. program Kampung Keluarga Berkualitas di Kota Balikpapan berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan walikota Balikpapan. SOP secara administrasi belum tersedia akan tetapi dalam pelaksanaan Kampung Keluarga Berkualitas memiliki SK pokja Kampung Keluarga Berkualitas.

3.2 Faktor Penghambat Implementasi program Kampung Keluarga Berkualitas di DP3AKB Kota Balikpapan

Faktor penghambat yang dihadapi oleh DP3AKB kota Balikpapan ada dua yaitu faktor penghambat internal dan faktor penghambat eksternal.

1. Faktor Penghambat Internal

Faktor penghambat dari internal penyelenggaraan program yaitu, kurangnya sumber daya finansial yang tersedia dari pemerintah untuk menjalankan program Kampung Keluarga Berkualitas di kota Balikpapan, hal tersebut membuat para penyuluh dalam beberapa kesempatan memberdayakan swadaya masyarakat guna membantu terlaksananya kegiatan-kegiatan Kampung Keluarga Berkualitas. Dimana sumber finansial sangat mempengaruhi sebuah program bisa berjalan dengan baik dan tidak.

2. Faktor Penghambat Eksternal

Faktor dari penghambat eksternal ialah pengetahuan dari masyarakat yang kurang mengenai manfaat serta kegiatan dari program Kampung

Keluarga Berkualitas. Masyarakat tidak mengikuti program KB karena banyaknya pemikiran yang belum tau banyak tentang KB.

3.3 Upaya-upaya guna mengatasi faktor penghambat Implementasi Program Kampung Keluarga Berkualitas di Kota Balikpapan

Upaya yang telah maupun yang sedang serta akan dilakukan oleh DP3AKB kota Balikpapan guna mengatasi faktor yang menghambat Program Kampung Keluarga Berkualitas di Kota Balikpapan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas SDM
2. Memberikan penghargaan untuk Kampung Keluarga Berkualitas
3. Menyediakan dana yang cukup terhadap program Kampung Keluarga Berkualitas
4. Pemberdayaan Usaha peningkatan pendapatan keluarga
5. Sosialisasi

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Implementasi Program Kampung Keluarga Berkualitas di Kota Balikpapan sejauh ini berjalan dengan baik dengan melaksanakan koordinasi terhadap opd maupun lintas sektor dalam rangka menguatkan kegiatan program Kampung Keluarga, melaksanakan monev dalam wawancara penulis dengan Ibu dr. Lis Indrayati sebagai Kepala bidang Keluarga Berencana DP3AKB. Pemerintah melakukan koordinasi terhadap opd serta lintas sektor dan melakukan evaluasi serta monitoring dan melakukan Kerjasama dengan media guna meningkatkan pemahaman kepada masyarakat.

Implementasi Program Kampung Keluarga Berkualitas di Kota Balikpapan dalam wawancara penulis dengan Ibu Aliwiati, A.Apt selaku kepala Dinas DP3AKB Balikpapan. mengenai Upaya peningkatan pemahaman mengenai pelaksanaan program di Kampung Keluarga Berkualitas. DP3AKB kota Balikpapan guna memacu kembali kampung KB yang sempat terhenti dengan cara melaksanakan kegiatan mengaktifkan poktan-poktan seperti Bina Keluarga balita Bina Keluarga lansia, bina keluarga remaja. Dari hasil wawancara tersebut sama dengan hasil dari penelitian Pengembangan Masyarakat Melalui Program Kampung Keluarga Berencana di Padukuhan Malangrejo Kecamatan Ngemplak Kabupaten Sleman (Zada Ghani Fuada,2020) dengan Pembentukan Kampung KB sebagai cara guna membentuk keluarga sejahtera.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian serta analisis yang penulis lakukan terhadap implementasi program Kampung Keluarga Berkualitas di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan anak dan Keluarga Berencana kota Balikpapan, penulis mengambil dan memberi kesimpulan sebagai berikut.

1. Implementasi Program Kampung Keluarga Berkualitas di Kota Balikpapan sejauh ini berjalan dengan baik meski sempat terhambat karena adanya pandemic covid 19. Pemerintah melakukan koordinasi terhadap opd maupun lintas sektor guna menguatkan kegiatan Kampung Keluarga Berkualitas di Kota Balikpapan.

2. Hambatan Hambatan dalam pelaksanaan program Kampung Keluarga Berkualitas di Kota Balikpapan masih ada terdapat permasalahan pada indikator sumber daya finansial dan sumber daya manusia yaitu masyarakat sebagai pelaksana program Kampung Keluarga Berkualitas.
 - a. Dalam permasalahan finansial terjadi karena dana yang didapatkan terbatas, meskipun ada Kampung Keluarga Berkualitas yang memiliki CSR tetapi permasalahan finansial tersebut jika tidak dibenahi dan diatasi akan membuat banyak kegiatan Kampung Keluarga Berkualitas menjadi terhambat yang menyebabkan pelaksanaan program Kampung Keluarga Berkualitas tidak maksimal
 - b. Dalam permasalahan sumber daya manusia yaitu masyarakat yang menjadi pelaksana program Kampung Keluarga Berkualitas terdapat Sebagian masyarakat yang tidak memahami tentang Kampung Keluarga Berkualitas dan masih menganggap KB adalah hal yang tabu, karena tidak sesuai dengan ajaran agama, faktor Pendidikan juga berpengaruh pada daya pikir masyarakat. Dengan adanya masyarakat yang tidak ingin ber KB bisa menyebabkan laju pertumbuhan penduduk di Balikpapan susah dikendalikan.
3. Upaya yang dilakukan dan akan dilakukan oleh DKP3AKB Kota Balikpapan guna mengatasi hambatan yaitu:
 1. Meningkatkan SDM
 2. Memberikan penghargaan untuk Kampung Keluarga Berkualitas guna meningkatkan semangat para penyuluh serta masyarakat Kampung Keluarga Berkualitas
 3. Melakukan Pemberdayaan Usaha peningkatan pendapatan keluarga
 4. Menyediakan dana yang cukup terhadap program Kampung Keluarga Berkualitas
 5. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini keterbatasan utama yakni waktu. Keterbatasan waktu penulis maksimalkan dalam proses Penelitian ini dalam hal Observasi, Dokumentasi dan Wawancara untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan penulis

Arah Masa Depan Penelitian (future work). Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penelitian yang penulis laksanakan, oleh karena itu untuk melengkapi kekurangan dalam penelitian ini penulis berharap ada yang meneruskan penelitian ini agar dapat memaksimalkan hasil dari penelitian ini.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan anak dan Keluarga Berencana kota Balikpapan beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan

penelitian dan membagi pengetahuan kepada penulis yang tentunya penulis dapat diterapkan pada di dunia kerja nanti.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Rusli, Budiman (2013). Kebijakan publik membangun pelayanan publik yang responsif, Bandung : Hakim publishing

Sugiyono (2021). Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: Penerbit Alfabeta

Muzdalifah.2020. Eksistensi Program Kampung Keluarga Berencana Terhadap Masyarakat Di Dusun Borong Ampirie Kecamatan Limpoe Kabupaten Sinjai. Makassar: Skripsi Universitas Islam Negeri

Fuada.2020. Pengembangan Masyarakat Melalui Program Kampung KB (Keluarga Berencana) Di Padukuhan Malangrejo Kecamatan Ngemplak Kabupaten Sleman. Yogyakarta: Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Rahman, H. M., & Indrawadi, J. (2019). Implementasi Program Kampung KB dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Gunung Pangilun Kecamatan Padang Utara Kota Padang. *Journal of Civic Education*, 2(3), 295-301.

<https://ppukab.bps.go.id/indicator/100/79/1/laju-pertumbuhan-penduduk-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-kalimantan-timur.html> diakses pada Kamis 15 September 2022

https://kaltim.bkkbn.go.id/?page_id=6499 diakses pada Kamis 15 September 2022

www.bkkbn.go.id diakses pada Kamis 15 September 2022

